



**HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PERKAPITA DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIADI JAWA TIMUR 2009-2013**

SKRIPSI

Oleh
Yuliatin
NIM 110810101144

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PERKAPITA DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR 2009-2013**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Yuliatin
NIM 110810101144

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Lasminatun dan ayahanda Suwarno tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang, ketulusan, cinta, semangatnya serta do'a yang tiada pernah putus diberikan kepadaku untuk terus menjadi seorang anak yang membahagiakan, untuk menjadi orang yang berguna bagi semua, dan lebih dewasa untuk mengenal arti kehidupan dan pembelajaran hidup dalam menuju jalan kesuksesan.
2. Mas Zainul Mustofa, Mbak Nida Zulaikha dan adek Zaki Zulkarnain yang tak henti-hentinya memberi suport kepada saya
3. Guru-guru TK hingga Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(terjemahan surat Al-mujadalah ayat 11)

Siapun yang belum pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru.

(Albert Einstein)

Sebuah perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.

(Lao Tzu)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yuliatin

NIM : 110810101144

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Hubungan antara pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur 2009-2013"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Yuliatin

NIM 11081010114

SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PERKAPITA DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIADI JAWA TIMUR 2009-2013**

Oleh
Yuliatin
NIM 110810101144

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra.Nanik Istiyani M.Si

Dosen Pembimbing II : Dr.Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Hubungan antara pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur 2009-2013
Nama Mahasiswa : Yuliatin
NIM : 110810101144
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 6 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani M.Si.
NIP. 196106221987022002

Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si.
NIP. 197002061994031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin. M. Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

**HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PERKAPITA DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIADI JAWA TIMUR 2009-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yuliatin

NIM : 110810101144

Jurusan: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 September 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si. (.....)
NIP. 1963061411990021001
2. Sekretaris : Drs. Badjuri M.E. (.....)
NIP. 195312251984031002
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santoso S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196807151993031001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomidan Bisnis
Dekan,

Foto 4 X 6

warna

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak
NIP. 197107271995121001

*HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PER KAPITA DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR 2009-2013*

Yuliatin

ABSTRAK

Hubungan antara pendapatan perkapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur tahun 2009 hingga 2013 mengasumsikan bahwa terhadap hubungan kausalitas atau korelasi antara pendapatan perkapita dan IPM di Jawa Timur. Namun, banyak perbedaan temuan dan hasil dimana di Jawa Timur khususnya hubungan pendapatan perkapita kurang berpengaruh terhadap IPM, sebaliknya juga IPM kurang berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dilihat secara keseluruhan, kategori tinggi dan menengah. Penelitian ini menggunakan uji *kausalitas granger* yang merupakan salah satu uji kausalitas untuk melihat panjang lag secara tepat. Penentuan panjang lag ini penting untuk menghindari kesalahan spesifikasi (*mispecified*) modal akibat lag terlalu pendek maupun pengurangan derajat kebebasan akibat lag terlalu panjang. Penentuan panjang lag menggunakan kriteria Akaike (AIC). Hasil pengujian menunjukkan Pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap IPM di Jawa Timur secara keseluruhan. Namun, IPM berpengaruh terhadap pendapatan perkapita secara keseluruhan. Sedangkan untuk daerah yang memiliki IPM tinggi dan menengah tidak berpengaruh atau tidak memiliki hubungan. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang berbeda-beda pada setiap wilayah dan perbedaan potensial daerah yang membuat pendapatan perkapita menjadi rendah atau bahkan bias dengan indeks pembangunan manusia untuk kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2013.

Kata Kunci: Pendapatan Perkapita, IPM, *Kausalitas Granger*, Jawa Timur

*RELATIONSHIP BETWEEN PERCAPITA INCOME AND HUMAN DEVELOPMENT
INDEX IN EAST JAVA 2009-2013*

Yuliatin

ABSTRACT

The relationship between per capita income and human development index (HDI) in East Java in 2009 and 2013 assumes that the causality or correlation between income per capita and HDI in eastern Java. However, many differences in the findings and the results of which in East Java, especially the relationship of income per capita is less influential on the HDI, HDI reverse is also less effect on overall visits per capita income, high and medium categories. This study using granger causality test which is one causality test to see exactly long lag. Determination of the long lag is important to avoid mistakes specification (mispecified) capital due to lag too short or reduction of degrees of freedom due to the lag is too long. Determination of the long lag using Akaike criterion (AIC). The test results showed no effect on per capita income, the HDI in East Java as a whole. However, IPM affect the overall per capita income. As for areas that have high and medium HDI does not affect or does not have a relationship. This is caused by income inequality are different in each region and the potential difference that makes the area per capita income is low or even biased by the human development index for districts in East Java in 2009 and 2013.

Keywords: Per Capita Income, HDI, Granger Causality, East Java

RINGKASAN

Hubungan Antara Pendapatan Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2009-2013; Yuliatin, 110810101144; 2016; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam institusi nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pengukuran keberhasilan pembangunan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tahun 1990 Perserikatan Bangsa Bangsa mulai memperkenalkan ukuran keberhasilan pembangunan melalui suatu indeks yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu ukuran yang meliputi gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu (1) usia panjang yang diukur dari usia harapan hidup, (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah, dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara.

Khususnya di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Hal ini menjadi menarik bahwa salah satu provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang melebihi Indonesia yaitu Jawa Timur dengan nilai PDRB yang tumbuh pada laju rata-rata 6,32 persen per tahun. Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,90 persen per tahun pada periode yang sama. Di tingkat wilayah,

IPM memberikan gambaran lebih luas untuk menilai bagaimana kemajuan pembangunan manusia serta dapat menghubungkan antara pendapatan masyarakat

dan kesejahteraan manusia. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi sampai saat ini masih menggunakan pendapatan per kapita penduduk dimana pendapatan per kapita merupakan indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar masyarakat di suatu negara. Kenaikan pendapatan per kapita yang dapat dicapai menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita mencerminkan daya beli masyarakat. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita masyarakat, maka daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat berarti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan serta menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui hubungan atau korelasi baik pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) maupun IPM terhadap pendapatan perkapita Jawa Timur tahun 2009-2013 secara menyeluruh, kategori tinggi dan menengah. Gambaran perilaku diukur menggunakan analisis kausalitas granger yaitu untuk meneliti hubungan atau pengaruh sebab akibat antar variabel yang diteliti yaitu IPM dan pendapatan perkapita Jawa Timur. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Terdapat hubungan satu arah dimana pendapatan per kapita memiliki korelasi terhadap indeks pembangunan manusia akan tetapi tidak untuk sebaliknya dimana IPM tidak berkorelasi terhadap pendapatan perkapita baik secara menyeluruh, kategori tinggi dan menengah. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang berbeda-beda pada setiap wilayah dan perbedaan potensial daerah yang membuat pendapatan perkapita menjadi rendah atau bahkan bias dengan indeks pembangunan manusia untuk kabupaten di Jawa Timur.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur 2009-2013”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis dan dukungan untuk menyusun tugas akhir yang baik dan tulus ikhlas;
2. Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan baik saran maupun kritik dan pengarahan dengan ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si. selaku Dosen Pengajar dan Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas tanpa henti memberikan motivasi, kritik, saran, dan pengajaran tanpa kenal lelah selama ini sehingga penulis memiliki pengalaman dan keteguhan hati menghadapi ujian dalam proses penyusunan tugas akhir;
4. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
7. Ibunda Lasminatun dan Ayahanda Suwarno, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, dukungan, kasih sayang, kerja keras, kesabaran dan pengorbanan selama ini;
8. Mase Zainul Mustofa,mbk Nida Zulaikha,adek Zaki fahmi Zulkarnain,mas M. Imam Zamroni,mbk Reni Widyawati dan keponakan-keponakan tante Alfian Nurul Harbi,Attaka Mazayarobbani,dan Fida Lafatusafiah beserta seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti;
9. Terima kasih banyak buat tersayang atas dukungan,kasih sayang,suport,kesabaran dan pengorbanan selama ini
10. Sahabat-sahabatku tersayangFerid,mas pepeng,bang gik,roni,fandi,bang dimas,bang riki,kluwek,popongterimakasih untuk semua cerita dan kenangan bersama, baik canda tawa maupun keluh kesah.
11. Sahabat-sahabatkuSMA Achoy, Teguh,Vedry,Utami,Zaenab,Ella,Fida,Umi,Via,Ruly,Yeni terima kasih untuk semua cerita dan kenangan bersama, baik canda tawa maupun keluh kesah
12. Saudara-saudaraku MAHAPENA mbk Devita,mas Anang,mas Nata,mbk ripin,mas lutfi,mbk tina,inunk,badara,gembel,pras dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih yang telah memberikan persaudaraan,pengalaman dan pengetahuan dalam bersosialisasi dan berorganisasi;
13. Saudara-saudaraku M.35 Hedy(ateng),Teguh,Catur,Priyo,Modz,Ave,Rendy,Andi,Ilham,Temon terima kasih untuk semua cerita dan kenangan bersama baik canda tawa maupun keluh kesah

14. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan khususnya angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih semuanya.
15. Teman-teman KKN(10) di Desa Panarukan kecamatan Situbondo Debi,Nadia,Diah,Dwiky,Rizky,Ian,Herwin,Rian yang memberikan pengalaman baru tentang kekeluargaan dan kebersamaan.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi.Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini.Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.Amien.

Jember, 17 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.2 Pendapatan Per Kapita	12
2.2 Pembangunan Manusia	13

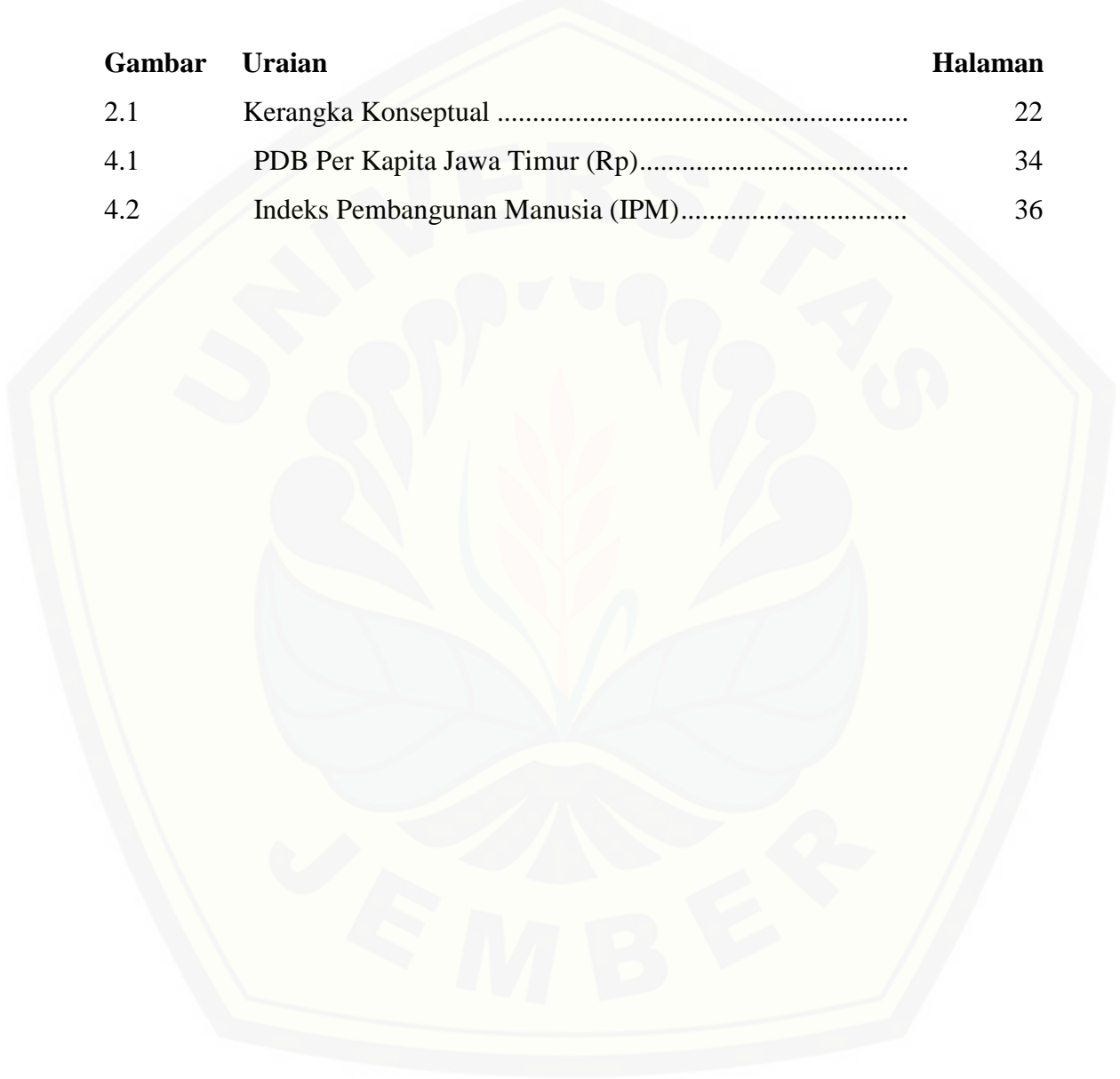
2.2.1 Indikator Indeks Pembangunan Manusia	17
2.3 Hubungan Pendapatan Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia	20
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Konseptual	22
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.2 Rancangan Penelitian	23
3.3 Populasi	24
3.4 Identifikasi Variabel	24
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	24
3.6 Analisa Data.....	25
BAB 4. PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum	28
4.1.1 Perkembangan Pendapatan Perkapita Jawa Timur	28
4.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur	30
4.2 Hasil Analisis Data	32
4.2.1 Analisis Kausalitas Hubungan Pendapatan Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur	34
4.3 Pembahasan	38
BAB 5. KESIMPULAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Berdasarkan Provinsi.....	02
2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	16
2.2	Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP).....	18
2.3	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	21
4.1	Hasil Penentuan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Panjang <i>Lag</i> Berdasarkan Kriteria Akaike	32
4.2	Hasil Penentuan Panjang <i>Lag</i> Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Kriteria Akaike Kategori Tinggi	33
4.3	Hasil Penentuan Panjang <i>Lag</i> Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Kriteria Akaike Kategori Menengah.....	33
4.4	Hasil Analisis Hubungan Kausalitas Pendapatan Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	33
4.5	Hasil Kausalitas Pendapatan Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kabupaten/ Kota yang Memiliki Indeks Pembangunan Mnausia Kategori Tinggi Di Jawa Timur Tahun 2009-2013	36
4.6	Hasil Analisis Hubungan Kausalitas Pendapatan Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Indeks Pembangunan Manusia Kategori Menengah Di Jawa Timur Tahun 2009-2013	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	22
4.1	PDB Per Kapita Jawa Timur (Rp).....	34
4.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
A	Data Penelitian.....	46
A.1	Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur 2009-2013.....	46
A.1.1	30 Kabupaten/Kota Berdasarkan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Untuk Kategori Tinggi	47
A.1.2	08 Kabupaten/Kota Berdasarkan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Untuk Kategori Menengah.....	53
A.2	Data Pendapatan Perkapita Kabupaten Di Jawa Timur 2009-2013.....	55
B	Hasil Regresi <i>Granger Causality</i>	56
B.1	Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur 2009-2013 ..	57
B.2	Untuk 08 Kabupaten Menengah	58

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam institusi nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan, suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro,2000).

Pengukuran keberhasilan pembangunan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tahun 1990 Perserikatan Bangsa Bangsa mulai memperkenalkan ukuran keberhasilan pembangunan melalui suatu indeks yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu ukuran yang meliputi gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu (1) usia panjang yang diukur dari usia harapan hidup, (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah, dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara (Kuncoro, 2006).

Pembangunan manusia menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal (Ginting, 2008)

Menurut Lanjouw, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenagakeras mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akansangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM Indonesia tahun 2014, yakni angka harapan hidup sebesar 68,9, harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto per kapita 9,788. Berikut indeks pembangunan manusia menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1: Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia berdasarkan provinsi

No	Provinsi	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	ACEH	70.35	70.76	71.31	71.7	72.16	72.51	73.05
2	SUMATERA UTARA	72.78	73.29	73.8	74.19	74.65	75.13	75.55
3	SUMATERA BARAT	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28	74.7	75.01
4	RIAU	74.63	75.09	75.6	76.07	76.53	76.9	77.25
5	JAMBI	71.46	71.99	72.45	72.74	73.3	73.78	74.35
6	SUMATERA SELATAN	71.4	72.05	72.61	72.95	73.42	73.99	74.36
7	BENGKULU	71.57	72.14	72.55	72.92	73.4	73.93	74.41
8	LAMPUNG	69.78	70.3	70.93	71.42	71.94	72.45	72.87
9	KEP. BANGKA BELITUNG	71.62	72.19	72.55	72.86	73.37	73.78	74.29
10	KEP. RIAU	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78	76.2	76.56

11	DKI JAKARTA	76.59	77.03	77.36	77.6	77.97	78.33	78.59
12	JAWA BARAT	70.71	71.12	71.64	72.29	72.73	73.11	73.58
13	JAWA TENGAH	70.92	71.6	72.1	72.49	72.94	73.36	74.05
14	DI YOGYAKARTA	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32	76.75	77.37
15	JAWA TIMUR	69.78	70.38	71.06	71.62	72.18	72.83	73.54
16	BANTEN	69.29	69.7	70.06	70.48	70.95	71.49	71.9
17	BALI	70.53	70.98	71.52	72.28	72.84	73.49	74.11
18	NUSA TENGGARA BARAT	63.71	64.12	64.66	65.2	66.23	66.89	67.73
19	NUSA TENGGARA TIMUR	65.36	66.15	66.6	67.26	67.75	68.28	68.77
20	KALIMANTAN BARAT	67.53	68.17	68.79	69.15	69.66	70.31	70.93
21	KALIMANTAN TENGAH	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06	75.46	75.68
22	KALIMANTAN SELATAN	68.01	68.72	69.3	69.92	70.44	71.08	71.74
23	KALIMANTAN TIMUR	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22	76.71	77.33
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	74.72
25	SULAWESI UTARA	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54	76.95	77.36
26	SULAWESI TENGAH	69.34	70.09	70.7	71.14	71.62	72.14	72.54
27	SULAWESI SELATAN	69.62	70.22	70.94	71.62	72.14	72.7	73.28
28	SULAWESI TENGGARA	68.32	69	69.52	70	70.55	71.05	71.73
29	GORONTALO	68.83	69.29	69.79	70.28	70.82	71.31	71.77
30	SULAWESI BARAT	67.72	68.55	69.18	69.64	70.11	70.73	71.41
31	MALUKU	69.96	70.38	70.96	71.42	71.87	72.42	72.7
32	MALUKU UTARA	67.82	68.18	68.63	69.03	69.47	69.98	70.63
33	PAPUA BARAT	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65	70.22	70.62
34	PAPUA	63.41	64	64.53	64.94	65.36	65.86	66.25
	INDONESIA	70.59	71.17	71.76	72.27	72.77	73.29	73.81

Sumber: data sekunder, BPS Indonesia

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa salah satu provinsi dengan indeks pembangunan manusia melebihi Indonesia yaitu Jawa Timur. Jawa Timur salah satu daerah dengan kinerja perekonomian cukup baik selama periode 2006-2013, terlihat dari nilai PDRB yang tumbuh pada laju rata-rata 6,32 persen per tahun. Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,90 persen per tahun pada periode yang sama. Di tingkat wilayah, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan output PDRB terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan sumbangan sebesar 25,28 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Jawa-Bali dan sebesar 14,88 persen terhadap pembentukan PDB nasional (2013). Laju pertumbuhan tersebut belum

cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Jawa Timur dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB/kapita Jawa Timur dan PDB/kapita nasional adalah sebesar 87,03 persen, maka pada tahun 2013 rasionya berkurang menjadi 78,36 persen

Perbaikan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 24,97 persen pada tahun 2008 menjadi 31,17 persen pada tahun 2014. Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis perdagangan dan jasa.

IPM bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia, karena IPM hanya menggambarkan tiga dimensi kesejahteraan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli dan tidak memasukkan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Namun demikian IPM memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan pembangunan manusia serta dapat menghubungkan antara pendapatan masyarakat dan kesejahteraan manusia.

Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi sampai saat ini masih menggunakan pendapatan per kapita penduduk.pendapatan per kapita sebagai indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antarmasyarakat ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan itu timbul karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antarnegara, misalnya struktur umum penduduk. Distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial budaya, dan perbedaan nilai tukar (kurs) satu mata uang terhadap mata uang yang lain (Arsyad, 2010: 34). Kenaikan pendapatan per kapita yang dapat dicapai menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.Pendapatan per kapita mencerminkan daya beli masyarakat.Dengan demikian jika terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita masyarakat, maka daya beli masyarakat meningkat.Peningkatan daya beli masyarakat berarti kemampuan masyarakat

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan meningkat. Peningkatan yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia (Arsyad, 2004).

Akan tetapi pada kenyataannya kenaikan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti oleh kenaikan pemenuhan kebutuhan hidup yang lain, seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Hal ini sering terjadi di negara-negara sedang berkembang yang memiliki karakteristik distribusi pendapatan yang timpang. Oleh karena itu diperlukan ukuran keberhasilan pembangunan yang lain yang mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Mengacu pada uraian tersebut makna perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai hubungan antara pendapatan perkapita dengan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010 s/d 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada korelasi antara pendapatan perkapita dengan indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2013 berdasarkan peringkat IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara keseluruhan?
2. Apakah ada korelasi antara pendapatan perkapita dengan Indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2013 berdasarkan peringkat IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk kategori tinggi?
3. Apakah ada korelasi antara pendapatan perkapita dengan Indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2013 berdasarkan peringkat IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk kategori menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, segala aktivitas yang dilakukan oleh peneliti pasti memiliki tujuan tertentu karena akan memberikan arah pelaksanaan suatu penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia secara menyeluruh di Jawa Timur Tahun 2009 hingga 2013.
2. Untuk mengetahui hubungan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia kategori tinggi di Jawa Timur Tahun 2009 hingga 2013.
3. Untuk mengetahui hubungan pendapatan per kapita terhadap indeks pembangunan manusia kategori menengah di Jawa Timur Tahun 2009 hingga 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah
Memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah Jawa Timur terkait pendapatan per kapita dengan pembangunan manusia, yang diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah.
2. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (mahasiswa).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Untoro dalam Purnamasari, 2011:10).

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets dalam Purnamasari,2011:11). Pertumbuhan merupakan gambaran dari kenaikan keadaan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan gambaran dari keadaan suatu masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi negara tersebut baik, sedangkan apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara rendah maka itu menggambarkan keadaan ekonomi negara tersebut buruk.

Untuk membahas pertumbuhan ekonomi timbul teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah (Arsyad, 2004 : 39) :

a. Teori Rostow

Teori Rostow mengenai pembangunan ekonomi sangat terkenal dan banyak mendapat komentar dari para ahli. Teori ini merupakan artikel Rostow. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam 5 (lima) tahap yaitu:

1) Masyarakat Tradisional

Menurut Rostow, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan itu masih terus turun temurun.

2) Tahap Prasyarat Tinggal Landas

Menurut Rostow, tahap ini merupakan suatu masa transisi dimasyarakat. Untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan dengan menggunakan kekuatan sendiri (*self-sustained growth*). Namun pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Penemuan baru tersebut harus digunakan untuk memodernisasi cara produksi yang didukung oleh kelompok masyarakat yang menciptakan tabungan dan pinjaman pada wiraswasta, sehingga akan meningkatkan produksi dan meningkatkan produktivitas.

3) Pada Awal Tahap Tinggal Landas

Pertumbuhan ekonomi terjadi dimana itu harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Misalnya adanya revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Menurut Rostow, terdapat 3 (tiga) ciri utama negara yang sudah mencapai tinggal landas, yaitu:

- a) Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% produk nasional bersih (*Net National Product= NNP*),
- b) Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (*leading sectors*),
- c) Terciptanya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

4) Tahap Menuju Kedewasaan

Menurut Rostow, tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi.

5) Tahap Konsumsi Energi

Tahap konsumsi ini merupakan tahap akhir pembangunan ekonomi Rostow. Tahap ini masyarakat menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi kesejahteraan masyarakat bukan masalah produksi. Dalam tahap ini ada 3 (tiga) tujuan masyarakat yaitu: (1). Memperbesar kekuasaan dan pengaruh keluar negeri, kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain, (2). Menciptakan kesejahteraan negara dengan mengusahakan terciptanya pembagian yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif, (3). Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang juga meliputi barang konsumsi tahan lama dan barang mewah.

6) Dasar pembedaan proses pembangunan menjadi 5 (lima) tahap tersebut adalah karakteristik perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional. Pembangunan ekonomi bukan berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya oleh penurunan peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri jasa (Arsyad, 2004: 41).

b. Teori Klasik

Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdapat dua aspek utama yaitu:

1) Pertumbuhan output total adalah sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya insani, dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumberdaya

alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Menurut Smith, sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

Menurut Adam Smith, stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumberdaya alam).

- 2) Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah diatas tingkat upah subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (DL) tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja (SL). Permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

- 3) Teori David Ricardo(1772-1823), dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* tahun 1817. Tidak berbeda jauh dengan Adam Smith yang berpendapat proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu David Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.
- 4) Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (marginal product) yang kita kenal dengan istilah *the law of diminishing returns*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah. Tingkat upah akan terhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai dibawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Dan tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian kearah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing returns*. Menurut David Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya, bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat penurunan tingkat hidup kearah tingkat hidup minimal.

c. Teori Neo Klasik(*Solow-Swan*)

Teori Neo Klasik Robert Solow(1957), pertumbuhan ekonomi adalah tergantung pada pertambahan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut Solow(1957) mengatakan

bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam ekonomi sangat tinggi. Temuan Solow bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang setinggi 2,75 persen per tahun pada periode 1909-1949, sebesar 1,5 persen merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah penggunaan faktor produksi.

2.1.2 Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara (Untoro, 2010: 13). Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Variable yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk nasional bruto dan jumlah penduduk. Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut: Pendapatan per kapita = Produk Nasional Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk.

Menurut Suprpto. (2011: 80) Pendapatan Perkapita suatu Negara merupakan tolak ukur kemajuan dari negara tersebut, apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di negara tersebut mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan, tapi pendapatan tersebut bukan hanya didapat / diperoleh dari mekanisme ekonomi masyarakatnya saja, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan / peningkatan pendapatan tersebut seperti keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya, kondisi alam ini dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan membuat pendapatan suatu negara akan mengalami penurunan. Hal ini berlaku bagi seluruh negara di belahan dunia tidak terkecuali di negara Indonesia.

Manfaat perhitungan pendapatan perkapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan per kapita dihitung secara berkala, biasanya 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain sebagai berikut (Alam, 2007: 50) :

- a. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
- b. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.
- c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya.
- d. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi

2.2 Pembangunan Manusia

Menurut *United Nations Development Programme* atau UNDP (2007), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging peoples' choices"*), yang menekankan pada kebebasan untuk sehat (*healthy*), terdidik (*educated*), dan mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Definisi cukup menyimpulkan bahwa aset berharga suatu negara adalah sumber daya manusia itu sendiri. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan suatu ukuran yang meliputi gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu 1) usia panjang yang diukur dari usia harapan hidup, 2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata lama tahun sekolah, dan 3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara (Kuncoro, 2006)

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b. Tinggi : IPM antara 66,0 – 79,9
- c. Menengah : IPM antara 50,0 – 65,9
- d. Rendah : IPM kurang dari 50,0

(Sumber: Orinbao, 2013)

Berdasarkan laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report*(HDR) 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

a. Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*equity*)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan prosesproses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlahkomponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan sehat.
- b. Dimensi pengetahuan.
- c. Dimensi kehidupan yang layak (BPS, 2012).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk

mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = 1/3[X(1)+ X(2) +X(3)]$$

Di mana :

X(1) : Indeks harapan hidup

X(2) : Indeks pendidikan

X(3) : Indeks standar hidup layak

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari IPM harus terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk), dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam menganalisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^3 L_i$$

$$L_i = \frac{X_i - MinX_i}{MaxX_i - MinX_i}$$

Di mana :

L_i : Indeks komponen IPM ke-i, dimana $i = 1,2,3$

X_i : Nilai indikator komponen ke-i $Max X_i$: Nilai maksimum X_i

$Min X_i$: Nilai minimum X_i

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	
Daya Beli (Rupiah)	732.720 ^a	300.000 (1996) 360.000 ^b (1999, dst)	Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan

Sumber : BPS, 2010.

Keterangan :

- a. Perkiraan maksimum pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II tahun 2018.
- b. Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

2.2.1 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

a. Indeks Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpark digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004 dalam BPS, 2012). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

b. Indeks Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan

beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

c. Indeks Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$C(I) = C(i) \quad \text{Jika } C(i) < Z$$

$$= Z + 2(C(i) - Z)^{\frac{1}{2}} \quad \text{Jika } Z < C(i) < 2Z \text{ dst}$$

di mana : C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita.

Z = Batas tingkat pengeluaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp 549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

Tabel 2.2 Komoditi kebutuhan pokok sebagai dasar penghitungan dayabeli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
Beras	Kg	Pepaya	Kg
Tepung- Terigu	Kg	Kelapa	Butir
Ikan Tuna	Kg	Kopi	Ons
Ikan Teri	Ons	Gula	Ons
Daging sapi	Kg	Garam	Ons
Ayam	Kg	Merica	Ons

Telur	Butir	Mie- Instan	80 gram
Susu kental- manis	397gram	Rokok	10 batang
Bayam	Kg	Listrik	Kwh
Kacang- Tanah	Kg	AirMinum	M3
KacangPanjang	Kg	MinyakTanah	Liter
Tempe	Kg	Bensin	Liter
Jeruk	Kg	Sewarumah	Unit

Sumber : BPS, 2010.

Menurut Todaro (2006:187) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

- a) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- b) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri).
- c) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, IPM diukur menggunakan 3 dimensi, yaitu pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Pendapatan perkapita merupakan salah satu komponen dalam menentukan IPM yang menunjukkan daya belimasyarakat. Jika pendapatan per kapita masyarakat tinggi, maka daya beli masyarakat juga tinggi. Tingginya daya beli masyarakat apakah mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan?

Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk membuktikan hubungan antara IPM dengan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang lain.

2.3 Hubungan Pendapatan Per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Semakin tinggi IPM, semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusianya (Arsyad, 2004). Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu negara, semakin tinggi pula daya beli penduduk Negara tersebut. Daya beli masyarakat yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat juga tinggi. IPM merupakan indeks yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu negara yang memiliki IPM tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tinggi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu komponen dari menyusun IPM, selain tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat suatu negara, seharusnya semakin tinggi juga IPM negara tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Negara yang memiliki pendapatan per kapita pada urutan tinggi tidak selalu memiliki IPM pada urutan yang tinggi pula.

2.4 Penelitian Terdahulu

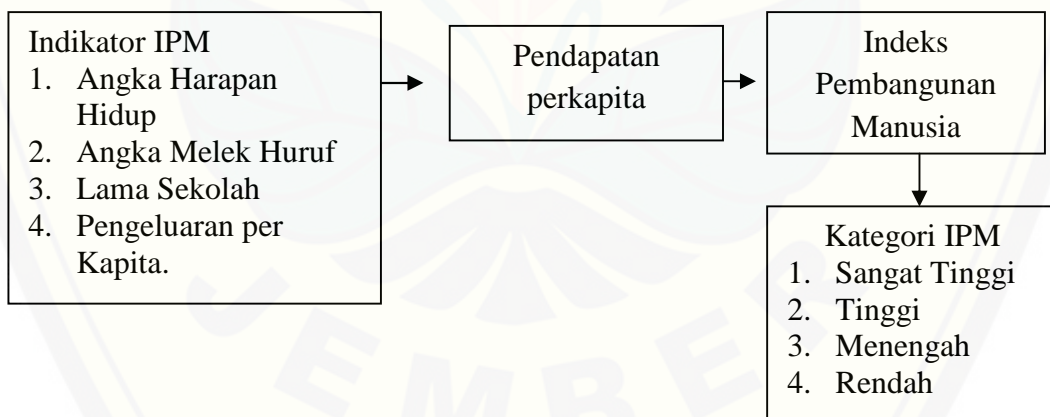
Penelitian ini dilakukan berpedoman pada penelitian terdahulu. Persamaan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu IPM dan pendapatan per kapita. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek, data yang digunakan, analisis serta jumlah sampel.

Tabel 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Algifari, (2011)	Hubungan Antara Pendapatan Per Kapita Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia	Korelasi Product Moment	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara pendapatan per kapita dan IPM tertinggi terdapat pada kelompok negara dengan IPM tinggi, yaitu sebesar 0,656779 dan terendah terdapat pada kelompok negara dengan IPM menengah.
2	Ranisetal (2006)	Hubungan antara Pembangunan Manusia (Human Development), IPM, dan pendapatan per kapita, di Filipina	Korelasi Product Moment	pendapatan per kapita memiliki hubungan yang kuat dengan IPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang tinggi, yaitu sebesar 0,8789
3	Sidharta (2010)	Hubungan antara IPM dengan komponen-komponennya, indikator fiscal pemerintah dan kemiskinan, di Sumedang	Korelasi Product Moment	Kontribusi tertinggi dari komponen IPM terhadap IPM adalah Angka Melek Huruf dengan besarnya koefisien korelasi sebesar 0,9584, disusul komponen Pengeluaran per Kapita Riil dengan koefisien korelasi sebesar 0,8729, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,7269, sedangkan kontribusi terendah pada IPM adalah Angka Harapan Hidup dengan koefisien korelasi sebesar 0,6599.
4	Khodabakhsi (2011)	Hubungan antara pendapatan per kapita dan IPM di India menggunakan data tahun 2005 hingga 2010.	Korelasi Pearson	Adanya hubungan positif yang lemah antara pendapatan per kapita dan IPM

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menjadikan pendapatan perkapita sebagai variabel bebas dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat. Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah bahwa perkapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat juga tinggi. IPM merupakan indeks yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu negara yang memiliki IPM tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tinggi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu komponen dari menyusun IPM, selain tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat suatu negara, seharusnya semakin tinggi juga IPM negara tersebut. Adapun kerangka konseptual penelitian dapat diuraikan pada gambar 2.1



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Menurut Arikunto, (2006). Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh penelitian bagi problematika yang diajukan penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran. Mengacu pada teori dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga ada korelasi antara pendapatan perkapita dengan indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2013 berdasarkan peringkat IPM kabupaten/kota di Jawa Timur secara keseluruhan
2. Diduga ada korelasi antara pendapatan perkapita dengan indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2013 berdasarkan peringkat IPM kabupaten/kota di Jawa Timur untuk kategori tinggi
3. Diduga ada korelasi antara pendapatan perkapita dengan indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2013 berdasarkan peringkat IPM kabupaten/kota di Jawa Timur untuk kategori menengah

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan konstruksi penelitian mulai dari data, objek, hingga metode analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Hasil analisis akan menggambarkan pergerakan dan estimasi tiap variabel yang akan digunakan untuk menjelaskan pembahasan penelitian menggunakan analisis kuantitatif.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan hitungan dari data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti (Sumarsono, 2004:69) dan studi pustaka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa perhitungan statistik. Menurut Kuncoro (2003: 124) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya (yang berhubungan dengan kata borisasi, karakteristik berupa kata dan dapat diangkakan).

b. Sumber Data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti (Sumarsono, 2004:69), data sekunder berupa laporan – laporan, dokumen, literature dan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini adalah data IPM Jawa Timur sejak 2009-2013.

3.2 Rancangan Penelitian

Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian korelasional, korelasional meneliti hubungan atau pengaruh sebab akibat. Keuntungan metode ini adalah kemampuannya memberikan bukti nyata mengenai hubungan sebab akibat yang langsung bias dilihat (Kriyantono, 2006: 62).

Penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi disebut metode korelasional. Peneliti dapat mengetahui berapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variable terikat serta besarnya arah hubungan yang terjadi.

3.3 Populasi

Populasi di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Setiady, 2007). Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau subjek yang diteliti (Notoatmodjo, 2005). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan perkapita 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur tahun 2009-2013.

3.4 Identifikasi Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, makavariabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Variable Independent* atau Variabel Bebas

Variable independent atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Per Kapita (X).

- b. *Variable dependent* atau variable terikat (Y)

Variable dependent atau variable terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Difinisi operasional variable merupakan faktor – faktor atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk dalam satu periode (biasanya satu satuan). satuan hitung yang di gunakan yaitu rupiah(Rp)

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia adalah komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasarnya itu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak satuan tahun. Besarnya IPM dari 0 sampai dengan 1.

- a. Sangat Tinggi : IPM lebih dari 80,0 – 100
- b. Tinggi : IPM antara 66,0 – 79,9
- c. Menengah : IPM antara 50,0 – 65,9
- d. Rendah : IPM kurang dari 50,0

(Sumber: Orinbao, 2013)

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi *United Nation: Economic and Social Commission For and Pacific* yang terdapat pada website www.unescap.org. Data penelitian mencakup pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi pada enam negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand dan Vietnam dari tahun 1998 sampai dengan 2010. Obyek penelitian yang hanya mencakup ke enam negara berdasar pertimbangan bahwa ke enam negara tersebut memiliki karakteristik perekonomian yang tidak terlalu berbeda. Dalam penelitian ini, data pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan persentase kenaikan produk domestik bruto (PDB) berdasarkan harga konstan di keenam negara tersebut. Sementara itu konsumen energi mencakup total konsumsi energi di keenam negara ASEAN yang dinyatakan dengan satuan juta ton setara minyak. Oleh karena mencakup berbagai negara selama beberapa tahun, maka data penelitian merupakan data panel.

Penelitian ini menggunakan pengujian kausalitas Granger. Salah satu isu dalam uji kausalitas ini adalah panjang *lag* harus tepat. Penentuan panjang *lag* ini penting untuk menghindari kesalahan spesifikasi (*misspecified*) modal akibat *lag* terlalu pendek maupun pengurangan derajat kebebasan akibat *lag* terlalu panjang. Penentuan panjang *lag* menggunakan kriteria Akaike (AIC). Pemilihan kriteria

Akaike dikarenakan penentuan panjang lag berdasarkan kriteria ini lebih unggul dari pada kriteria lain (Liew,2004). Nilai kriteria Akaike (AIC) yang lebih kecil menunjukkan modal yang lebih baik. Selanjutnya pengujian kausalitas Granger akan mengkaji apakah pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh konsumsi energi ataukah sebaliknya

Pengujian kausalitas Granger mencakup estimasi pasangan regresi berikut:

$$PKT_{it} = \sum_{i=1}^n \alpha_i IPM_{it-1} + \sum_{j=1}^n \beta_j PKT_{it-j} + u_{1it}$$

$$IPM_{it} = \sum_{i=1}^n \lambda_i IPM_{it-1} + \sum_{j=1}^n \delta_j PKT_{it-j} + u_{2it}$$

Keterangan :

PKT adalah pendapatan perkapita (persen)

IPM adalah indeks pembangunan manusia

t adalah dimensi waktu (tahun)

i adalah unit belah silang

Terdapat beberapa kemungkinan yang kan terjadi.

1. *Unidirectional causality* dari *IPM* terhadap *PKT*_{*i*}. Jika $\sum \alpha_i \neq 0$; sedangkan $\sum \delta_i = 0$
2. *Unidirectional causality* dari *PKT* terhadap *IPM*. Jika $\sum \alpha_i = 0$; sedangkan $\sum \delta_i \neq 0$
3. *Bilateral causality*, ditunjukkan pada saat koefisien dari *PKT* dan *IPM* berbeda dengan nol [$\sum \alpha_i \neq 0$ dan $\sum \delta_i \neq 0$]
4. *Independence* yang ditunjukkan dari koefisien *PKT* dan *IPM* sama dengan nol $\sum \alpha_i = 0$ dan $\sum \delta_i = 0$

Pengujian kausalitas Granger mendasarkan pada uji *F* berikut.

$$F = \frac{RSS_R - RSS_{UR} / m}{RSS_{UR} / (n-k)}$$

RSS_R adalah jumlah kuadrat residual pada *unrestricted regression* RSS_{UR}

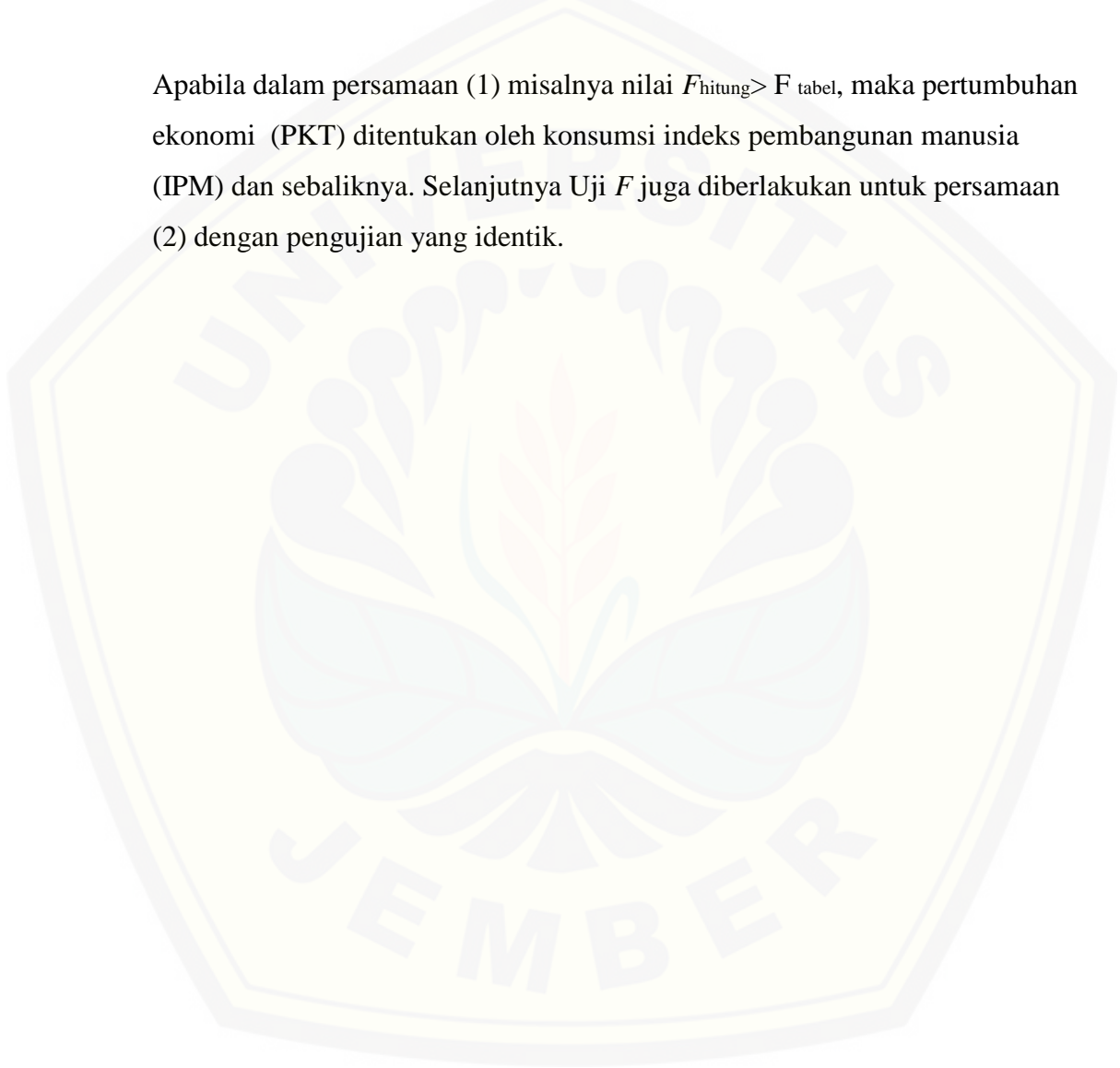
adalah jumlah kuadrat residual pada *unrestricted regression*

m adalah jumlah *lagged M term*

n adalah jumlah data

k adalah jumlah parameter dalam *unrestricted regression*

Apabila dalam persamaan (1) misalnya nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka pertumbuhan ekonomi (PKT) ditentukan oleh konsumsi indeks pembangunan manusia (IPM) dan sebaliknya. Selanjutnya Uji F juga diberlakukan untuk persamaan (2) dengan pengujian yang identik.



BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap IPM di Jawa Timur secara keseluruhan. Namun, IPM berpengaruh terhadap pendapatan perkapita secara keseluruhan.
2. Untuk daerah yang memiliki IPM dengan kategori tinggi, Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan IPM, begitupun sebaliknya, IPM tidak memiliki hubungan terhadap pendapatan perkapita untuk kategori tinggi.
3. Pada kategori menengah, pendapatan perkapita tidak memiliki korelasi atau hubungan terhadap IPM begitupun sebaliknya

Hal tersebut didasarkan pada ketimpangan pendapatan yang berbeda-beda pada setiap wilayah dan perbedaan potensial daerah yang membuat pendapatan perkapita menjadi rendah atau bahkan bias dengan indeks pembangunan manusia untuk kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, tingkat pendidikan yang belum menyeluruh menimbulkan kualitas sumber daya manusia masing-masing daerah berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara pendapatan perkapita dan IPM di Jawa Timur dengan kategori keseluruhan, tinggi dan menengah.

5.2 Saran

Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi setiap penduduk guna peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Serta adanya peran pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi beberapa aspek kebijakan yang berkaitan tentang

pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan akibat kualitas maupun tempat tinggal penduduk yang berbeda setiap daerah khususnya dikabupaten-kabupaten Jawa Timur. Selanjutnya perlu adanya peningkatan kinerja perekonomian domestic untuk menunjang peningkatan pendapatan perkapita mulai dari penyediaan modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan untuk meningkatkan pembangunan terutama pembangunan penduduk Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang hubungan IPM dengan pendapatan perkapita serta perlu adanya pembaharuan dalam penelitian dan dapat memasukkan variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia khususnya Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2011. *Hubungan Antara Pendapatan PerKapita Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Vol. 5, No. 3, November 2011. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan. Edisi 4*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik (BPS) , 2012. *Jakarta Dalam Angka 2012*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 2015, *Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004- 2013* diakses dari <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235>
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Indeks Pembangunan Manusia 1996– 2013* Diakses dari, <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/909>
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Indeks Pembangunan Manusia 2010- 2015 Menurut Provinsi. Diakses di* <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/909>
- Badan Pusat Statistik, 2016, *PDB Perkapita Jawa Timur 2010-2015. Diakses dari* <http://jatim.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab3>
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. 2008. “Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, Vol.4, No.1, Agustus 2008. Hal 17-24
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Khodabakhshi, Akbar, 2011, *Relationship between GDP and Human Development Indices in India, International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 3, June 2011.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi 4*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

- Mirza, D.S., 2012, *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id> pada tanggal 24 Februari 2013.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. P.T. Rineka Cipta., Jakarta.
- Purnama Sari, Gita. 2011. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap penerimaan Pajak Indonesia. Skripsi*. Bandung; Garuda Dikti.
- Ranis, Gustav, Frances Stewart; Emma Samman, 2006. *Human Development: Beyond Human Development Index. Journal of Human Development*. Vol. 7, No. 3, November 2006.
- Shome, S.; Tondon, S. 2010, *Balancing Hman Development with Growth: A Study of Asean 5, Annals of the University of Petro ani, Economics*, 10(1), 2010, 335-348.
- Sidharta. 2010. *Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Komponen-komponendan Indikator Fiskal dan Kemiskinan. Jurnal Dharma Praja*. Vol. 3 No. 1 2020.
- Sumarsono, Sonny, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I. Edisi Ketujuh*. Erlangga. Jakarta.
- UNDP. 2007. *United Nations Development Programme: Indonesia. Retrieved 24 May 2007, 2007*, diakses dari <http://www.undp.or.id/mdg/index.as>
- Untoro, Joko, 2010, *Ekonomi*, Jakarta, Kawahmedia.
- Widodo, Adi., Waridin., Maria, Johanna. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. UNDIP Semarang. Vol 1. No 1.

Winarti, Astri. 2014.
Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, PDB terhadap IPM di Indonesia Periode 1992-2012. Semarang: Fakultas Ekonomidan Bisnis, UNDIP, Skripsi hal 42-45

Website

<http://Wikipedia.org>

<http://bps.go.id>



Lampiran A. Data Penelitian

A.1 Data Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	01. Pacitan	71.45	72.07	72.48	72.88	73.36
2	02. Ponorogo	69.75	70.29	71.15	71.91	72.61
3	03. Trenggalek	72.72	73.24	73.66	74.09	74.44
4	04. Tulungagung	72.93	73.34	73.76	74.45	74.49
5	05. Blitar	73.22	73.67	74.06	74.43	74.92
6	06. Kediri	71.33	71.75	72.28	72.72	73.29
7	07. Malang	70.09	70.54	71.17	71.94	72.34
8	08. Lumajang	67.26	67.82	68.55	69.00	69.50
9	09. Jember	64.33	64.95	65.53	65.99	66.60
10	10. Banyuwangi	68.36	68.89	69.58	70.53	71.02
11	11. Bondowoso	62.11	62.94	63.81	64.98	65.39
12	12. Situbondo	63.69	64.26	64.67	65.06	65.73
13	13. Probolinggo	62.13	62.99	63.84	64.35	65.19
14	14. Pasuruan	66.84	67.61	68.24	69.17	69.77
15	15. Sidoarjo	75.88	76.35	76.90	77.36	78.15
16	16. Mojokerto	72.93	73.39	73.89	74.42	75.26
17	17. Jombang	72.33	72.70	73.14	73.86	74.47
18	18. Nganjuk	70.27	70.76	71.48	71.96	72.49
19	19. Madiun	69.28	70.18	70.50	70.88	71.46
20	20. Magetan	72.32	72.72	73.17	73.85	74.34
21	21. Ngawi	68.41	68.82	69.73	70.20	70.86
22	22. Bojonegoro	66.38	66.92	67.32	67.74	68.32
23	23. Tuban	67.68	68.31	68.71	69.18	70.04
24	24. Lamongan	69.03	69.63	70.52	71.05	71.81
25	25. Gresik	73.98	74.47	75.17	75.97	76.36
26	26. Bangkalan	64.00	64.51	65.01	65.69	66.19
27	27. Sampang	58.68	59.70	60.78	61.67	62.39
28	28. Pamekasan	63.81	64.60	65.48	66.51	67.17
29	29. Sumenep	64.82	65.60	66.01	66.41	66.89
30	71. Kota Kediri	75.68	76.28	76.79	77.20	77.80
31	72. Kota Blitar	76.98	77.42	77.89	78.31	78.70
32	73. Kota Malang	76.69	77.20	77.76	78.43	78.78
33	74. Kota Probolinggo	73.73	74.33	74.85	75.44	75.94
34	75. Kota Pasuruan	73.01	73.45	73.89	74.33	74.75
35	76. Kota Mojokerto	76.43	77.02	77.50	78.01	78.66
36	77. Kota Madiun	76.23	76.61	77.07	77.50	78.17
37	78. Kota Surabaya	76.82	77.28	77.85	78.33	78.97
38	79. Kota Batu	73.88	74.45	74.93	75.42	76.09
	35. Jawa Timur	71.06	71.62	72.18	72.83	73.54

A.1.1 30 Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat indeks pembangunan manusia untuk kategori Tinggi				
No	Kabupaten Kota	Tahun	Perkapita	IPM
1	Kab. Pacitan	2009	2,1012	71,45
		2010	2,4652	72,07
		2011	2,7299	72,48
		2012	5,5425	72,88
		2013	11,1923	73,36
2	Kab. Ponorogo	2009	2,9966	69,75
		2010	3,6634	70,29
		2011	4,0489	71,15
		2012	8,1653	71,91
		2013	16,3279	72,61
3	Kab. Trenggalek	2009	2,7738	72,72
		2010	3,4132	73,24
		2011	3,8127	73,66
		2012	7,7268	74,09
		2013	15,5072	74,44
4	Kab. Tulungagung	2009	7,5463	72,93
		2010	8,6409	73,34
		2011	9,6595	73,76
		2012	19,5736	74,45
		2013	39,3905	74,49
5	Kab. Blitar	2009	8,5625	73,22
		2010	10,4197	73,67
		2011	11,5114	74,06
		2012	23,0852	74,43
		2013	45,9701	74,93
6	Kab. Kediri	2009	10,1915	71,33

		2010	12,0693	71,75
		2011	13,4596	72,28
		2012	27,1116	72,72
		2013	54,8118	73,29
7	Kab. Malang	2009	23,0939	70,09
		2010	27,5662	70,54
		2011	31,1467	71,17
		2012	63,6479	71,94
		2013	129,0562	72,34
8	Kab. Lumajang	2009	9,1000	67,26
		2010	11,7855	67,82
		2011	13,2140	68,55
		2012	26,5728	69,00
		2013	53,3428	69,50
9	Kab. Banyuwangi	2009	22,1316	68,36
		2010	27,5337	68,89
		2011	31,1640	69,58
		2012	64,5703	70,53
		2013	131,7011	71,02
10	Kab. Pasuruan	2009	47,5137	66,84
		2010	55,8072	67,61
		2011	63,0881	68,24
		2012	128,0826	69,17
		2013	253,7975	69,77
11	Kab. Sidoarjo	2009	64,9605	75,88
		2010	78,1654	76,35
		2011	88,9465	76,90
		2012	183,6191	77,36
		2013	371,3003	78,15

12	Kab. Mojokerto	2009	27,3113	72,93
		2010	33,2999	73,39
		2011	37,5216	73,89
		2012	76,5161	74,42
		2013	153,0637	75,26
13	Kab. Jombang	2009	1,4163	72,33
		2010	1,7215	72,70
		2011	19,0390	73,14
		2012	38,3644	73,86
		2013	77,0238	74,47
14	Kab. Nganjuk	2009	8,9969	70,27
		2010	11,3322	70,76
		2011	12,5622	71,48
		2012	25,3069	71,96
		2013	50,8619	72,49
15	Kab. Madiun	2009	6,6379	69,28
		2010	8,2004	70,18
		2011	9,1573	70,50
		2012	18,5921	70,88
		2013	37,4944	71,46
16	Kab. Magetan	2009	6,8948	72,32
		2010	9,1290	72,72
		2011	10,1232	73,17
		2012	20,3186	73,85
		2013	41,0113	74,34
17	Kab. Ngawi	2009	7,4584	68,41
		2010	9,6343	68,82
		2011	10,8030	69,73
		2012	22,0305	70,20

		2013	44,6135	70,86
18	Kab. Bojonegoro	2009	30,0306	66,38
		2010	38,9251	66,92
		2011	48,0845	67,32
		2012	92,3503	67,74
		2013	184,9867	68,32
		19	Kab. Tuban	2009
2010	34,1580			68,31
2011	38,1404			68,71
2012	77,5455			69,18
2013	157,0154			70,04
20	Kab. Lamongan	2009	15,7740	69,03
		2010	19,9021	69,63
		2011	22,2103	70,52
		2012	45,4602	71,05
		2013	92,4943	71,81
21	Kab. Gresik	2009	562,4656	73,98
		2010	74,2144	74,47
		2011	84,0804	75,17
		2012	170,2482	75,97
		2013	343,4445	76,36
22	Kota Kediri	2009	74,5474	75,68
		2010	92,7574	76,28
		2011	102,6035	76,79
		2012	210,6957	77,20
		2013	423,1165	77,80
23	Kota Blitar	2009	4,1567	76,98
		2010	5,1254	77,42
		2011	5,7142	77,89

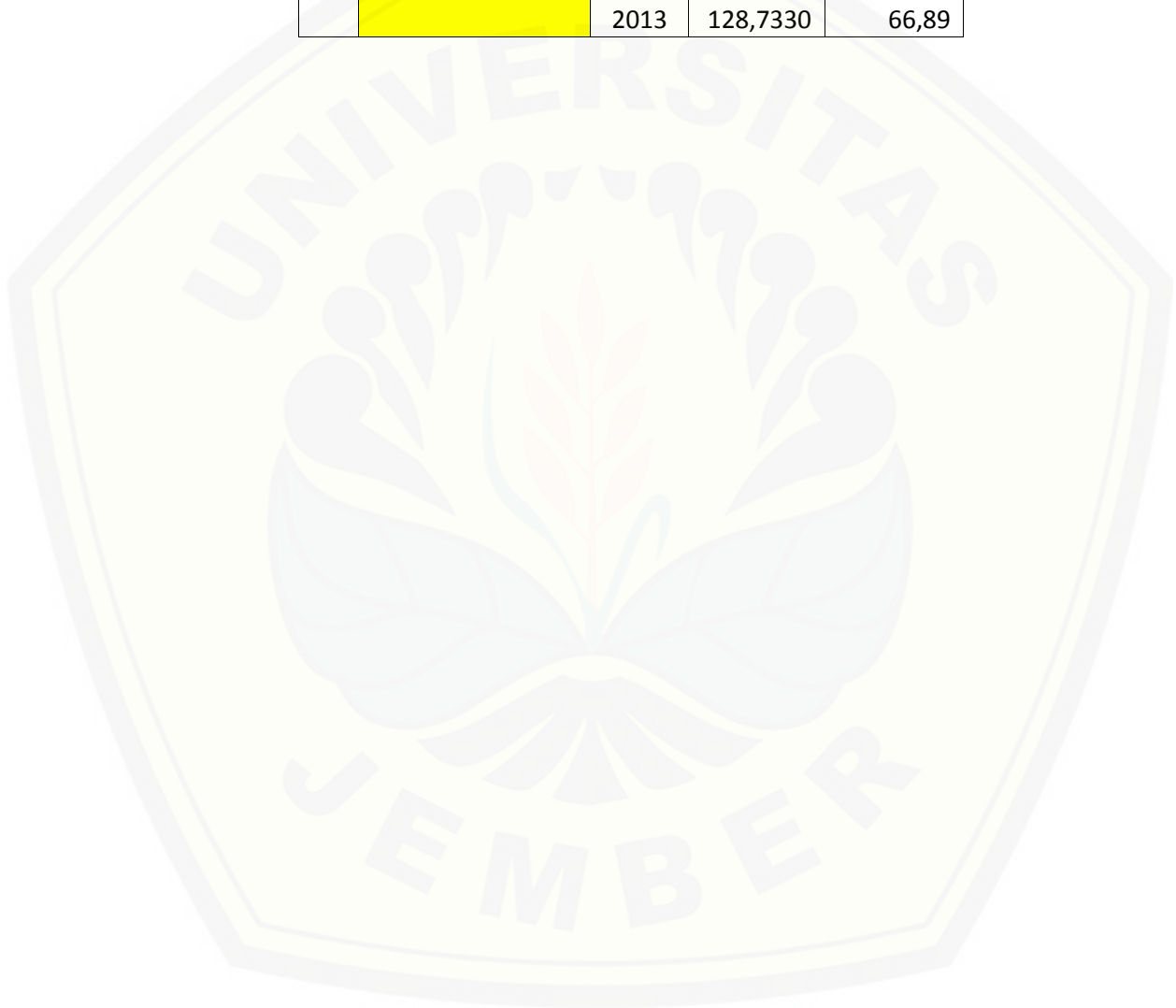
		2012	11,5737	78,31
		2013	23,3203	78,70
24	Kota Malang	2009	93,3458	76,69
		2010	116,8584	77,20
		2011	129,5025	77,76
		2012	260,9052	78,43
		2013	524,2369	78,78
25	Kota Probolinggo	2009	17,3180	73,73
		2010	22,6723	74,33
		2011	24,6309	74,85
		2012	49,5245	75,44
		2013	99,4084	75,94
26	Kota Pasuruan	2009	15,3360	73,01
		2010	18,8523	73,45
		2011	20,8566	73,89
		2012	41,7750	74,33
		2013	83,5270	74,75
27	Kota Mojokerto	2009	13,9093	76,43
		2010	16,0376	77,02
		2011	17,6798	77,50
		2012	35,5648	78,01
		2013	71,2321	78,66
28	Kota Madiun	2009	27,4922	76,23
		2010	35,5701	76,61
		2011	39,6298	77,07
		2012	79,6706	77,50
		2013	161,3302	78,17
29	Kota Surabaya	2009	1405,5155	76,82
		2010	1751,9755	77,28

		2011	1972,4840	77,85
		2012	4016,6375	78,33
		2013	8168,4642	78,97
30	Kota Batu	2009	46,5473	73,88
		2010	54,1149	74,45
		2011	60,5181	74,93
		2012	121,5340	75,42
		2013	248,2874	76,09



A.1.2 8 Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat indeks manusia pembangunan pada kategori Menengah				
No	Kabupaten Kota	Tahun	Perkapita	IPM
1	Kab. Jember	2009	20,7978	64,33
		2010	27,7572	64,95
		2011	30,7314	65,53
		2012	62,1418	65,99
		2013	124,2369	66,60
2	Kab. Bondowoso	2009	5,6815	62,11
		2010	7,2350	62,94
		2011	8,0705	63,81
		2012	16,3346	64,98
		2013	32,9348	65,39
3	Kab. Situbondo	2009	6,3558	63,69
		2010	7,5741	64,26
		2011	8,4786	64,67
		2012	17,3099	65,06
		2013	34,9989	65,73
4	Kab. Probolinggo	2009	11,3857	62,13
		2010	13,4583	62,99
		2011	15,0273	63,84
		2012	30,4349	64,35
		2013	61,3076	65,19
5	Kab. Bangkalan	2009	18,1686	64,00
		2010	21,5554	64,51
		2011	23,9088	65,01
		2012	44,2623	65,69
		2013	87,1754	66,19
6	Kab. Sampang	2009	12,0780	58,68
		2010	14,9227	59,70
		2011	16,3943	60,78
		2012	32,6806	61,67
		2013	68,1316	62,39
7	Kab. Pamekasan	2009	8,8266	63,81
		2010	10,5608	64,60

		2011	11,9059	65,48
		2012	24,3007	66,51
		2013	49,1869	67,17
8	Kab. Sumenep	2009	19,6446	64,82
		2010	23,3725	65,60
		2011	26,8050	66,01
		2012	56,0581	66,41
		2013	128,7330	66,89



A.2 Data PendapatanPerkapitaKabupaten di JawaTimur 2009-2013

Kab/Kota	Pendapatan Perkapita				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Pacitan	2,10	2,47	2,73	5,54	11,19
Kab. Ponorogo	3,00	3,66	4,05	8,17	16,33
Kab. Trenggalek	2,77	3,41	3,81	7,73	15,51
Kab. Tulungagung	7,55	8,64	9,66	19,57	39,39
Kab. Blitar	8,56	10,42	11,51	23,09	45,97
Kab. Kediri	10,19	12,07	13,46	27,11	54,81
Kab. Malang	23,09	27,57	31,15	63,65	129,06
Kab. Lumajang	9,10	11,79	13,21	26,57	53,34
Kab. Jember	20,80	27,76	30,73	62,14	124,24
Kab. Banyuwangi	22,13	27,53	31,16	64,57	131,70
Kab. Bondowoso	5,68	7,24	8,07	16,33	32,93
Kab. Situbondo	6,36	7,57	8,48	17,31	35,00
Kab. Probolinggo	11,39	13,46	15,03	30,43	61,31
Kab. Pasuruan	47,51	55,81	63,09	128,08	253,80
Kab. Sidoarjo	64,96	78,17	88,95	183,62	371,30
Kab. Mojokerto	27,31	33,30	37,52	76,52	153,06
Kab. Jombang	1,42	1,72	19,04	38,36	77,02
Kab. Nganjuk	9,00	11,33	12,56	25,31	50,86
Kab. Madiun	6,64	8,20	9,16	18,59	37,49
Kab. Magetan	6,89	9,13	10,12	20,32	41,01
Kab. Ngawi	7,46	9,63	10,80	22,03	44,61
Kab. Bojonegoro	30,03	38,93	48,08	92,35	184,99
Kab. Tuban	27,68	34,16	38,14	77,55	157,02
Kab. Lamongan	15,77	19,90	22,21	45,46	92,49
Kab. Gresik	562,47	74,21	84,08	170,25	343,44
Kab. Bangkalan	18,17	21,56	23,91	44,26	87,18
Kab. Sampang	12,08	14,92	16,39	32,68	68,13
Kab. Pamekasan	8,83	10,56	1,91	24,30	49,19
Kab. Sumenep	19,64	23,37	26,80	56,06	128,73
Kota Kediri	74,55	92,76	102,60	210,70	423,12
Kota Blitar	4,16	5,13	5,71	11,57	23,32
Kota Malang	93,35	116,86	129,50	260,91	524,24
Kota Probolinggo	17,32	22,67	24,63	49,52	99,41
Kota Pasuruan	15,34	18,85	20,86	41,78	83,53
Kota Mojokerto	13,91	16,04	17,68	35,56	71,23
Kota Madiun	27,49	35,57	39,63	79,67	161,33
Kota Surabaya	1.405,52	1.751,98	1.972,48	4.016,64	8.168,46
Kota Batu	46,55	54,11	60,52	121,53	248,29

Lampiran B. Hasil Regresi Granger causality
Hasil 37 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: IPM PKT

Exogenous variables: C

Date: 09/23/16 Time: 03:33

Sample: 2009 2013

Included observations: 74

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-655.0239	NA	176601.5	17.75740	17.81967	17.78224
1	-141.2679	985.8560*	0.183516*	3.980214*	4.167030*	4.054738*
2	-139.9481	2.461322	0.197367	4.052651	4.364011	4.176856
3	-138.7780	2.118886	0.213208	4.129134	4.565038	4.303022

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 09/23/16 Time: 01:38

Sample: 2009 2013

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PKT does not Granger Cause IPM	148	1.59560	0.2086
IPM does not Granger Cause PKT		6.25245	0.0135

B.1 Untuk 30 kabupaten/kotatangi

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: IPM PKT

Exogenous variables: C

Date: 09/23/16 Time: 03:36

Sample: 2009 2013

Included observations: 60

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-657.4348	NA	12060075	21.98116	22.05097	22.00847
1	-96.21651	1066.315	0.103481	3.407217	3.616652*	3.489138
2	-90.56619	10.35893*	0.098001*	3.352206*	3.701264	3.488742*
3	-89.03139	2.711477	0.106539	3.434380	3.923060	3.625529

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 09/23/16 Time: 03:37

Sample: 2009 2013

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PKT does not Granger Cause IPM	90	0.64274	0.5284
IPM does not Granger Cause PKT		0.10004	0.9049

B.2 Untuk 8 kabupatenmenengah

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: IPM PKT

Exogenous variables: C

Date: 09/23/16 Time: 03:38

Sample: 2009 2013

Included observations: 16

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-106.5689	NA	2685.681	13.57112	13.66769	13.57606
1	-40.78307	106.9020*	1.198546*	5.847884*	6.137605*	5.862720*
2	-39.80787	1.340906	1.810284	6.225984	6.708852	6.250710
3	-37.73537	2.331556	2.503543	6.466922	7.142937	6.501539

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 09/23/16 Time: 01:51

Sample: 2009 2013

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PKT does not Granger Cause IPM	32	0.40229	0.5309
IPM does not Granger Cause PKT		0.18604	0.6694